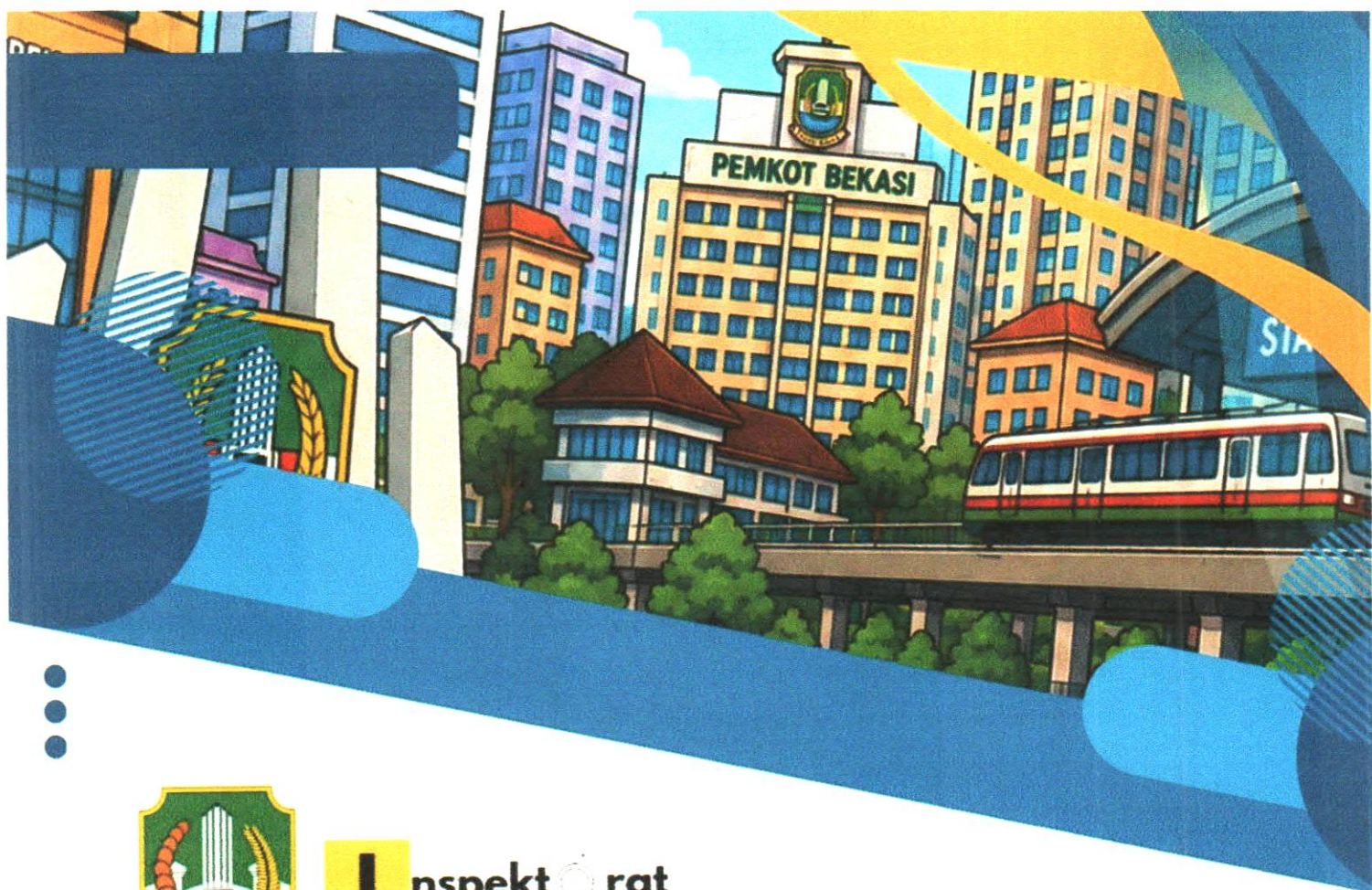




LAPORAN PELAKSANAAN FKP

(Forum Konsultasi Publik)

Inspektorat Daerah Kota Bekasi

www.Inspektorat.bekasikota.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

.....	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.3 METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	7
1.4 HASI PELAKSANAAN FKP	8
1.5 PENUTUP	10
LAMPIRAN I	i
1. Berita Acara.....	i
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) (Foto-Foto Pelaksanaan FKP)	x
.....	x
3. Dokumentasi Publikasi SKM	xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan public. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu Upaya pemerintah untuk melibatkan Masyarakat dalam pelayanan public melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan public. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP. Antara lain terkait dengan rancangan kebijakan , penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggra pelayanan public atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggra pelayan maupun publik. Penyelenggra pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi public sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggraan FKP merupakan salah satu Upaya penyelenggra pelayanan meyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan public, Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggrakan pada Pemerintah Kota Bekasi.

1.2 Tujuan dan Manfaat

A. TUJUAN

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada inspektorat Daerah Kota Bekasi bertujuan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan partisipasi Masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Adapun tujuan pelaksanaan FKP meliputi:

1. Mendapatkan masukan, saran, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi, khususnya terkait dengan pengawasan, konsultasi, pengaduan masyarakat, serta layanan informasi publik.
2. Mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan pengguna layanan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Membangun keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, penyempurnaan, serta pengembangan standar pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan pelayanan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
5. Menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil diskusi antara inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan masyarakat, perangkat Daerah, dan pihak terkait.
6. Mewujudkan Pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berintegritas sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

B. Manfaat

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat Daerah Kota Bekasi
 - Memperoleh masukan langsung dari pengguna layanan sebagai bahan evaluasi.
 - Menjadi sarana untuk mengetahui tingkat kepuasan dan

kebutuhan masyarakat.

- Mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan penerapan tatakelola pemerintah yang baik (good governance).

2. Bagi Masyarakat/Pengguna Layanan

- Memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait pelayanan.
- Mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme dan jenis layanan inspektorat.
- Mendorong pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan responsif.

3. Bagi Pemangku Kepentingan

- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam perbaikan pelayanan publik.
- Menjadi wadah bersama untuk menyusun solusi terhadap permasalahan pelayanan.

4. Bagi Pemerintah Daerah

- Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
- Menjadi bahan pengambilan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi meliputi pembahasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dengan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait.

Ruang Lingkup kegiatan meliputi :

1. Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- Pembahasan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
- Evaluasi terhadap proses, prosedur, waktu layanan, dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

2. Pembahasan Standar Pelayanan
 - Penyampaian dan peninjauan standar pelayanan yang berlaku.
 - Identifikasi kebutuhan penyempurnaan standar pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna layanan.
3. Penjaringan Aspirasi dan Masukan Masyarakat
 - Pengumpulan saran, kritik, serta masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
 - Identifikasi kendala yang dihadapi pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan Inspektorat.
4. Pembahasan Jenis Layanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi
 - Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Layanan Audit Investigasi
 - Layanan Audit Perhitungan Kerugian keuangan negara
 - Layanan Permintaan Bantuan Keterangan Ahli
 - Layanan Konsultasi Lisan
 - Layanan Konsultasi Tertulis
 - Layanan Penanganan laporan gratifikasi pada unit pengendalian gratifikasi
 - Layanan Probity Audit
 - Layanan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan
5. Peningkatan Transparansi dan Akutabilitas Pelayanan
 - Mendorong keterbukaan informasi pelayanan
 - Penguatan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pelayanan publik.
6. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan pelayanan
 - Merumuskan hasil diskusi sebagai bahan evaluasi.
 - Menyusun tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik di Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
7. Peningkatan Partisipasi Pemangku kepentingan
 - Melibatkan unsur masyarakat, perangkat daerah akademis, organisasi masyarakat, media, dan pihak terkait lainnya dalam memberikan prespektif terhadap pelayanan publik.

1.3 METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan Pada hari Senin

Tanggal : 5 Januari 2026

b. Tempat Pelaksanaan

Bertempat di Ruang Pengawasan 2 Inspektorat Daerah Kota Bekasi

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Penyelenggara Kegiatan dari Inspektorat Daerah Kota Bekasi

b. Peserta FKP

Peserta Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2027 adalah seluruh perangkat daerah

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilakukan secara tatap muka.

4. Susunan acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.30 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 – 09.05	Pembukaan oleh MC	Panitia
09.09 – 09.10	Pembacaan Doa	Panitia
09.10 – 09.15	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
09.15 – 09.45	Sambutan Plt.Inspektur Kota Bekasi	Plt.Inspektur Kota Bekasi
09.45 – 10.45	Pemaparan Rencana Pelayanan dilingkungan Inspektorat Daerah Kota Bekasi	Para Irban dilingkungan Inspektorat Daerah Kota Bekasi
10.45 – 11.45	Diskusi / Tanya-Jawab	Seluruh Peserta

1.4 HASI PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

- a. Masih terdapat keterlambatan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat karena padatnya kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Bekasi
- b. Seluruh layanan belum terintegrasi dalam satu platform digital, masih terdapat proses yang memerlukan input berulang;
- c. Keterbatasan anggaran dan waktu menyebabkan belum sempurnanya penanganan audit di perangkat daerah
- d. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan sasaran organisasi;
- e. Masih ditemukan pelanggaran;
- f. Tingginya jumlah konsultasi melalui tatap muka menyebabkan respon belum seragam dan terdokumentasi dengan baik;
- g. Pemberi layanan pada perangkat daerah memiliki tingkat pemahaman regulasi yang berbeda-beda;

2. Analisis

Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik dan Inventarisasi masukan dalam Forum Konsultasi Publik, masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat daerah Kota Bekasi. Permasalahan tersebut antara lain pada Pelayanan Pengaduan masyarakat masih terdapat keterlambatan penanganan.

Selain itu pada pelayanan penanganan laporan gratifikasi belum seluruh masyarakat dan penerima layanan berani melapor tindakan-tindakan gratifikasi tersebut proses tersebut dibutuhkan sosialisasi terhadap penerima layanan dan masyarakat

Tingginya Penugasan yang dilakukan oleh auditor dan kurangnya staf pada inspektorat menjadi penyebab keterlambatan pelayanan pada inspektorat daerah kota bekasi

Pemahaman serta kemampuan kapasitas pemberi layanan berbeda-beda mengakibatkan salah persepsi.

Dengan demikian, hasil Forum Konsultasi Publik menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam hal pengawasan.

3. Rencana Aksi

Sebagai tindak lanjut Forum Konsultasi Publik, rencana aksi yang akan dilaksanakan antara lain :

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	Indikator Keberhasilan	Target Waktu
1.	Belum adanya layanan Pengawasan Berbasis digital	Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan.	Laporan monitoring dan rekomendasi perbaikan tersedia.	Berkelanjutan
2.	Belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat	Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peningkatan kompetensi petugas pengelola pengaduan	Persentase penyelesaian pengaduan meningkat sesuai standar pelayanan	Berkelanjutan
3.	Kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi Inspektorat	Melaksanakan sosialisasi pelayanan kepada perangkat daerah dan masyarakat melalui media sosial, website, dan kegiatan	Peningkatan jumlah kegiatan sosialisasi dan jangkauan informasi	Berkelanjutan
4.	Belum optimalnya pengukuran kepuasan masyarakat	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala dan menindaklanjuti hasil survei	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat	Berkelanjutan
5.	Belum optimalnya kompetensi petugas pelayanan	Melaksanakan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi publik	Pelayanan Lebih baik	Berkelanjutan

1.5 PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik (FKP), Inspektorat Daerah Kota Bekasi Berkomitmen untuk :

1. Menindaklanjuti masukan pemangku kepentingan dalam rangka mempertajam target kinerja, sarana, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan pengawasan.
2. Mengoptimalkan rencana aksi yang dihasilkan sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan
3. Menjadikan hasil forum sebagai landasan dalam penyempurnaan layanan yang ada di Inspektorat Daerah Kota Bekasi agar lebih baik dan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi

Kota Bekasi, 8 Januari 2026

Plt. Inspektur Kota Bekasi ,



Dr. Amran, S.T., M.Si., CGCAE., CGRS

NIP 19690923 200212 1 004

LAMPIRAN I

1. Berita Acara



PEMERINTAH KOTA BEKASI INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17141
Email: inspektorat.bekasikota@gmail.com, Laman: www.inspektorat.kotabekasi.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 500.12/DA/141/ITKO-S&A

Pada hari ini, senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam telah dilaksanakan pembahasan Forum Konsultasi Publik pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Forum dihadiri oleh unsur penyelenggara pelayanan, Perangkat Daerah terkait serta para pemangku kepentingan lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan

1. Pemaparan materi disampaikan oleh Plt Inspektur Kota Bekasi, Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kota Bekasi, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kota Bekasi, Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kota Bekasi, Inspektur Pembantu Investigasi dan Inspektur Pembantu UPD.
2. Berdasarkan paparan, diskusi serta penyampaian saran dan masukan dari seluruh peserta forum, disepakati beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - b) Layanan Audit Investigasi
 - c) Layanan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
 - d) Layanan Permintaan Bantuan Keterangan Ahli
 - e) Layanan Konsultasi Tertulis
 - f) Layanan Konsultasi Lisan
 - g) Layanan Penanganan Laporan Gratifikasi pada unit pengendalian Gratifikasi
 - h) Layanan Probity Audit
 - i) Layanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
3. Menindak lanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar penyempurnaan standar pelayanan dan inovasi layanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
4. Seluruh masukan dan rekomendasi peserta forum akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KOTA BEKASI INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No 1 Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17141
Email: inspektorat.bekasikota@gmail.com, Laman: www.inspektorat.kotabekasi.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Senin 5 Januari 2026
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Acara : Review Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi
Tempat : Ruang Pengawasan 2 Kantor Inspektorat Kota Bekasi
Lantai 4 Gedung D Perkantoran Pemerintah Kota Bekasi

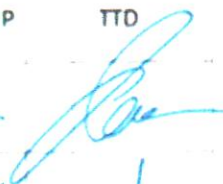
NO	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	L/P	TTD
1	Amrison	DH. Inspektur	L	
2	Ferdinan	Man. wil I	L	
3	Indrawaty Gth.	Intan wil 3	P	
4	Indri	Intan upd.	P	
5	Abd-jabbar	perencana	L	
6	Erfen	Karubag a & k	P	
7	Arri Mustika	Analisis kebijakan	P	
8	Husnaeni	PRUPD	P	
9	Yunas A.	Intan Invest	L	
10	Moli Hard	Auditor Utama	L	
11	Chandra H	Admin	L	

No	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	L/P	TTD
12	Sofia Anstt	staf ^{TV} Jember	P	afy.
13	Henri. S	Kasubag TU Madijaga	P	H
14	NUR Rochman	" KPR UTARA	L	R
15	Emi-	kecamatan emdure	L	H
16	Fibri N	sekretaris DPPRS	P	lyal
17	Susi	Kasubag TU PRRS	P	ps.
23	Jawi	staf ke-cekari Sekitan	L	H
24	Reski	staf "	P	H
25	BHELLA Z	Kasubag TU	P	H
26	Armayotri	DISNAKER	P	H
27	EDY ANEKAULLAH	DISPARBUD	L	H
28	Nulan	Disnaker	P	H
29	Baru Seno	DISPERKIMTAN	L	H
30	Ari Wira M	kec. Medansatria	P	H
31	Niti Harol Haq	Disdankarmat	P	H
32	Renaulina	Disco	P	H

No	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	L/P	TTD
33	Amisly AH	Sets SatPOL PP		
34	Rika Suarni	Sekcam Bekasi Timur		
35	Popy	Bapenda	P	
36	Rino P	DINSAT	P	
37	Sarwitas	Dispropda	P	
38	Syera	Disdagperin	P	
39	Devi	Disdagperin	P	
40	Khaerul	DEMPTSP	L	
41	A. Saruri	DEMPTSP	L	
42	Dewi Setika	Sekretaris BPD	P	
43	Norge S	Disdukcapit	P	
44	Muhaimin	Disperin	L	
45	Yuli-Surastiwati	RSUD Ciam	P	
46	Wijayanti A	DPPPA	P	
47	Hanna	Disperin	P	
48	Nora H	Disperin	P	

No	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	L/P	TTD
49	ROSALINA TERESA	Sekecam - KCBK	P	
50	DENI ACHJANI	Sekecam - Kc Bkt Bad	P	
51	Dian Octavia	Disduk.	P.	
52	Ari Murtadi	Subm PD.		
53	SRI Devina-S	Diskominfo Studi	P	
54	Betty	Kec. Bks. Timur	P	
55	Heryanto	Sebidro Duktur	L	
56	Lustana	Sekidit DPMPTSP	P	
57	Pini Istari	Sekecam Mustorogaym	P	
58	M. Rusli	Sekecam Mediasatman	L	
59	NANADO. ✓	^{Pondok Mekar} Kc Subang Tg	L	
60	Lailatul M.	Kasebag Unpeg DEMSDA	P	
61	Armanan	JFP DPMSDA	L	
62	Noveng Sumiati	Sebidro DP3A	P	
63	Rianti	Dagor setda	P	
64	Resa Hestian	Bapperida	P	

No	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	L/P	TTD
65	Nasilah Suci	JFP / Bappasida	P	
66	Aprilani	Kasubag TU B-Selatan	P	
67	Rosita	Jafung Perencana DLT	P	
68	Hamidah	Kasubag Perencanaan	P	
69	Hendriana Yuni	Kasubag TU UKM	L	
70	Lusi S	Sekretaris Ekstern	P	
71	2/Agar	Prosecuror	L	
72	Hardian G	Perencana	L	
73	Anes	Staf 'acc' Bank Kertas	L	
74	Nana H	SPINAN	P	
75	nur ainun	Okopp	P	
76	Rully	Bprap	L	
77	Hedny	Bappasida	L	
78	Dahaij	BPK-AN	L	
79	Sulhanu	'	L	
80	Forman Zulkahri	PRPP / IPEO	L	

No	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	L/P	TTD
81	Dadan	PRUPD / HKO	L	
82	A. MURIN	Stafel. PR	L	
83	Ferdia	PRUPD	L	
84	SHELFIE	Kasubag TU	P	
85	Adi Wanda	PRUPD	L	
86	Hermawan	PRUPD	L	
87	Danny AM	PRUPD	L	
88	Yessi Tolanda	PRUPD / ITKO	P	
89	Tri Kartika	Disdiknas	P	
90	Rudo Riska	Disampudra	L	
91	Satrio Pangs	IT KO	L	
92	Aldi	Kasubag TU DPRP	L	
93	HENRY M	Disdikcapil	L	
94	Polly R	Sekolahpora	L	
95	Yuni	Katimber Pemas. Daria	P	
96	Henri S.	Kesbangpol	P	

No	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	L/P	TTD
97	Ririn Handayani	Perencana Ahu Muda Setda	P	
98	Moh. Hardi	Auditor Utama	L	
99	Irwan	Disampora	P	
100	Somno	Wako	P	
96	Hangga	PPUPD	L	
97	N H H W U	SETORSDIK	L	
98	Wang Azizah	Pondokside	P	
99	Asep G	"	L	
100	Abd. Jabbar	Wako	L	
101	Arif Kurnia	PPUPD	L	
102	Yuliyanti A. Sanger	PPUPD Wako	P	
103	Taufik H. H	Sejarah Wako	P	
104	Fitri A	Kerubbag TU Kec. Bekasi Barat	P	
105	Yann	Pelaksana	P	
106	Agung	Diskominfo	P	
107	David	Dis. Kominfo	P	

No	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	L/P	TTD
108	Pedra	polisi amalan	1	
109	Ridwan	kebo	L	
110	Erwin	kebo Kajit Sampurna	L	
111	Dadang	-	L	
112	Budi	-	-	
113	Sulung	PPUPD	L	
114	Putri	PPUPD	P	
115	Didiet	PPUPD	P	
116	Rima K	PPUPD	P	
117	Cucu H	PPUPD	L	
118	Hermani	PPUPD ITFO	1	
119				
120				
121				
122				
123				

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) (Foto-
Foto Pelaksanaan FKP)



3. Dokumentasi Publikasi SKM

